

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang telah bergulir 20 (dua puluh) tahun lalu telah membawa dampak yang besar dan signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan pola kerja birokrasi yang mencakup segala aspek dan kajian mulai dari model pembiayaan, pelaku dan juga standart operasional prosedurnya. Reformasi telah merambah ke semua aspek dan lini salah satunya adalah pada pelaksanaan dan pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

Bergulirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi tongga; utama dalam sejarah kamajuan desa yang berada di seluruh Indonesia dimana telah terjadi perubahan paradigma secara besar-besaran yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai salah satu yang menjadi amanat undang-undang tersebut yaitu adanya pemberian hak otonom kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri, hal itu termasuk juga sebagai upaya untuk menggali keberadaan sumber-sumber keuangan melalui potensi yang dimiliki dan berada di desa tersebut yang dapat dijadikan sumber pendanaan desa.¹ Upaya pembentukan dan pembangunan destinasi atau daerah wisata yang berada di wilayah pedesaan yang menjadi trend dapat ditempuh pemerintahan desa yang tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat desa dengan pengelolaan desa wisata dengan baik dan benar.

Model desa wisata yang selama ini juga menjadi trend di beberapa desa khususnya di Kabupaten Ponorogo sebenarnya memiliki potensi melestarikan keadaan alam dan juga menjadikan keberadaan desa Karang Patihan Kecamatan Balong dengan terbentuknya dan pembangunan wana wisata Gunung Beruk desa Karangpatihan yang telah dirintis sejak 2015 dengan menggunakan keberadaan dana desa yang ada. Dalam pembangunan wana wisata Gunung Beruk tersebut menjadi suatu pilot project yang dapat mencapai keberhasilan dengan

¹ Mustofa Ahda. 2017. *Pengembangan Desa Wisata Bangun Cipto*. *Jurnal Pemberdayaan*. Volume 1 Nomor 1 Juli 2017, Hal. 89-94

dilakukan dan pencatatan serta diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, sehingga mampu menarik minat pengunjung yang secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa Karangpatihan.

Selain dilihat dari aspek keuangan dan keluasaan atas pemberian hak sebagaimana dimaksud, pembangunan wana wisata harus melibatkan masyarakat sekitar dan hal ini juga telah menjadi amanat dari undang-undang desa dimana dijelaskan bahwa pembangunan desa serta pembuatan peraturan desa harus menganut azas partisipatif.

Partisipasi adalah merupakan suatu keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mendukung menopang dalam pencapaian tujuan pada kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.² Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan seluruh masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena akan menjadi kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan. Selain itu partisipasi masyarakat juga akan menjadi tolok ukur dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Partisipasi menjadi penting mengingat bahwa pembangunan pada prinsipnya diselenggarakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk memenuhi produktifitas kinerja pemerintahan.³

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa merupakan salah satu dinamika yang terjadi akibat dari reformasi birokrasi yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Kemudian di awal-awal pembangunan biasanya selalu dilaksanakan pembangunan dengan keterlibatan pemerintah desa yang sangat dominan di semua tahapan pembangunan, sementara prosesnya tanpa memperhatikan keterlibatan masyarakat.

² AD Siti Irene, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar) 44.

³ Arismayanti, Ketut, 2015, *Pariwisata Hijau Sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia*, Jurnal Analisis Pariwisata, 15.ISSN 1410-3729, Universitas Udayana.

Partisipasi tidak hanya sebagai salah satu prasyarat formal tetapi juga merupakan upaya untuk membesarkan peranan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukannya sendiri sehingga juga terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan informasi.⁴ Dengan kata lain, partisipasi masyarakat adalah upaya untuk mencerdaskan masyarakat. Menurut pendapat Kartasasmita (1997) yang menyatakan bahwa dengan studi empiris memberi petunjuk bahwa kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak mampu mencapai sasaran, hal itu karena kurangnya partisipasi masyarakat bahkan dalam beberapa kasus.

Partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat desa yang secara umum disebut dengan sumber daya manusia adalah sebagai subyek sekaligus dapat dianggap sebagai obyek dari pembangunan masyarakat desa Karangpatihan. Hal demikian itu menunjukkan pada setiap usaha pembangunan desa perlu melibatkan seluruh warga masyarakat dengan memanfaatkan segala komponen

Partisipasi masyarakat dalam konteks masyarakat desa yang disebut sebagai sumber daya manusia adalah sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek dari pembangunan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa pada setiap usaha pembangunan perlu melibatkan seluruh rakyat dengan memanfaatkan segala komponen dan kompetensi yang dimiliki seperti semangat, ide atau gagasan, kecerdasan dan tenaga. Demikian halnya pada pembangunan masyarakat desa, pembangunan akan dikatakan berhasil apabila telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan desa wisata di Indonesia dapat diketahui melalui data jumlah desa wisata yang telah terbentuk selama periode 2010 sampai 2014 dari renstra Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. Tercatat ada 200 desa wisata pada tahun 2010, kemudian meningkat hingga tercatat sebanyak 822 desa wisata pada tahun 2014.⁵ Salah satu Daerah di Indonesia yang juga mengembangkan desa Wisata adalah Kabupaten Ponorogo yang telah

⁴ Rizal Andreeyan, 2014, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, e-jurnal Administrasi Negara 2 (4): 1938 – 1951 ISSN 0000-0000.

⁵ Nikita, Hakim. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Tulungrejo Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 61 No. 3 Agustus 2018

menetapkan tagline “Ethnic Art of Java”. Salah satu desa yang terkenal dengan destinasi wisata desanya adalah Desa Karangpatihan yaitu mengembangkan wisata desa dengan bentuk wana wisata.

Keberhasilan pemerintah desa Karangpatihan dalam membangun destinasi wisata melalui Wana Wisata Gunung Beruk tentu juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa Karangpatihan itu sendiri sebab tidak mungkin hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaksana dan juga penerima manfaat dari aspek sosial ekonomi tentu memiliki motivasi yang besar untuk turut serta berpartisipasi di dalam pembangunan desanya. Hal ini yang jarang di *ekspose* keluar sehingga yang banyak kita ketahui adalah sebatas capaian kinerja pemerintahan desa.

Berdasarkan observasi awal terhadap data kunjungan wisatawan diketahui bahwa pengunjung wana wisata Gunung Beruk cukup signifikan tidak hanya pengunjung yang berasal dari daerah setempat tetapi juga dari luar kota bahkan banyak turis yang berkunjung ke sana rata-rata pada hari libur mencapai 700 orang pengunjung per hari.

Pembangunan Wana Wisata Gunung Beruk merupakan program pemerintah Desa Karangpatihan yang dituangkan melalui peraturan Desa. Partisipasi masyarakat Karangpatihan beraneka ragam khususnya dalam mengikuti setiap tahapan pembangunan, memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga pengelolaannya pun ditangani oleh penduduk setempat.

Proses pembangunan di semua tahapan harus diketahui oleh masyarakat secara luas sebagai bentuk dari transparansi dan juga akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga selain akan berdampak pada stigma masyarakat, prestasi yang didapatkan juga akan menjadi pusat perhatian sebagai contoh dari desa-desa lain yang belum melaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Destinasi Desa Wisata (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana dalam penjabaran diatas, yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan destinasi desa Wana Wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Faktor apa yang menunjang dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan destinasi desa Wana Wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan destinasi desa wana wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui factor yang menunjang dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan destinasi desa Wana Wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. **Manfaat Penelitian** Berdasarkan pembahasan ini maka diharapkan ada manfaatnya yaitu:

1. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka mengasah daya berfikir dan dapat mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh dibangku kuliah selama mengikuti pembelajaran di kampus.

2. Bagi pemerintah sebagai kebijakan dalam pembangunan destinasi wisata secara operasional dan manajerial untuk perbaikan dari waktu ke waktu.
3. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak serta referensi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama dalam ilmu pemerintahan serta menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan penegasan istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang di laksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.⁶

3. Pembangunan

Makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan (*social plan*) yang akan dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk membuat perubahan sebagai suatu proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian dalam konseptualisasi dalam pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang sifatnya berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupanyang lebih baik atau masyarakat dalam keadaan lebih sejahtera, kemudian ada suatu cara untuk mengukur dan menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu Negara.⁷

3. Destinasi

⁶ Rusdarti, Jazuli. 2015. *Partisipasi masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Di Lasem. Journal of Educational Social Studies*. ISSN 2252 - 6390

⁷ Subandi, 2011, *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan kesatu, Alfabeta Bandung, 45.

Destinasi atau daerah tujuan wisata dalam UU Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 yang menyatakan bahwa destinasi wisata disuatu wilayah ditujukan untuk menjadikan suatu kawasan geografis yang berlokasi disalah satu atau beberapa wilayah administrative yang didalamnya terdapat daa tarik wisata, yang terdapat fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta menjadikan masyarakat salingf terkait dan saling melengkapiterwujudnya kepariwisataan.⁸

4. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.⁹



⁸ Undang-undang nomor 10 tahun 2009, Tentang : Kepariwisataan, 4.

⁹ *Op.Cit.* Nikita, Hakim. 2018.

F. Landasan Teori

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.¹⁰

Kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹¹

Berdasarkan beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program

¹⁰ Siti Irene, A.D., *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011, Hal. 50

¹¹ Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Citra Utama) Hal. 46

pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta” atau berpartisipasi.¹²

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.¹³

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai tradisi, sikap dan kebersamaan dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

c. Partisipasi Masyarakat dan Kriterianya

1) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong

¹² Warsito, 2015, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Ombak), h.115- 116

¹³ Beni Ahmad Sabeni, 2012, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 137-140

kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.¹⁴

Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :¹⁵

- (1) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- (b) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
- (c) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna. (d) Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
- (e) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (f) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi

¹⁴ *Op. Cit.* Siti irine. 2011

¹⁵ *Ibid*, hal 34-35

di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

2) Kriteria Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu¹⁶.

a) Partisipasi langsung

Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi ini terjadi secara tidak langsung misalnya dengan cara mendelegasikan atau mewakilkan kepada orang lain.

Pendapat lain disampaikan oleh Septyasa (2013) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu¹⁷

¹⁶ Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates*. Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo. Hal 22

- a) Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan. Partisipasi dalam pelaksanaan
- b) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- c) Partisipasi dalam evaluasi

Kriteria dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :¹⁸

- a) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat;
- b) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya;
- c) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya;
- d) Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri;
- e) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban”.

Menurut Mardikanto dkk mengatakan ada empat langkah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: a) Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- b) Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
- c) Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.

¹⁷ Laksana, Nuring Septyasa. (2013). *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal kebijakan dan manajemen publik, Vol. 1, NO. 1, Hal. 56-67.

¹⁸ Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokus Media*. Bandung. Hlm. 54

d) Memelihara hasil-hasil pembangunan.¹⁹

2. Perencanaan Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten.²⁰

Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.²¹

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industri-alisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya

¹⁹ Mardikanto Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, Hal. 33

²⁰ Wahjudin, dalam Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, Hal: 266-267

²¹ Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 67.

merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.²² Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute.

b. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:²³

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam

²² Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 62.

²³ *Ibid*

pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.²⁴ **c. Perencanaan Pembangunan Desa**

Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.²⁵ **d. Penyusunan RPJM Desa**

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Didalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala

²⁴ Adisasmata, Raharjo, 2013, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hal. 57

²⁵ Kessa, Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hal. 19

desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

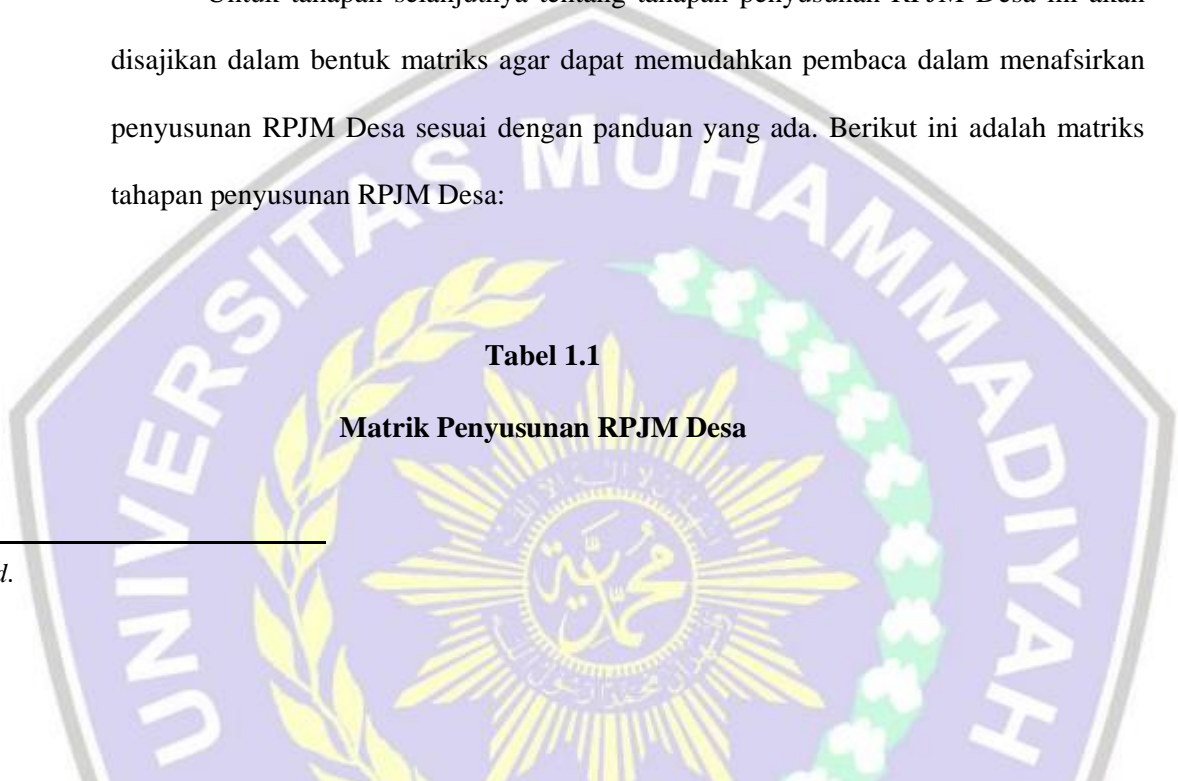
Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

- 1) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- 2) Pendapatan Desa;
- 3) Penyusunan tata ruang Desa;
- 4) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 5) Pengelolaan informasi Desa;
- 6) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- 8) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.²⁶

Untuk tahapan selanjutnya tentang tahapan penyusunan RPJM Desa ini akan disajikan dalam bentuk matriks agar dapat memudahkan pembaca dalam menafsirkan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan panduan yang ada. Berikut ini adalah matriks tahapan penyusunan RPJM Desa:

Tabel 1.1
Matrik Penyusunan RPJM Desa

²⁶ *Ibid.*



No (1)	Tahapan/Kegiatan (2)	Hasil/Keluaran (3)	Keterangan (4)
1.	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa		Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2.	Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota	Data dan analisi: <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/ kota; • Rencana strategis organisasi perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • Rencana pembangunan kawasan perdesaan 	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
3.	Pengkajian Keadaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data Desa (data sekunder) • Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa 	Tim Penyusun RPJM Desa
4.	Analisis Data dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Data desa yang sudah diselaras kan; • Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; • Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan • Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa

5.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Berita acara Penyusunan RPJM Desa, yang melampiri: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa
6.	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa
7.	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa
8.	Penetapan dan Perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	<input type="checkbox"/> Kades <input type="checkbox"/> BPD

Sumber: Buku Perencanaan Pembangunan 2019 Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat peneliti jelaskan sedikit mengenai alur tahapan penyusunan RPJM Desa. Mulai dari pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini sampai ke penetapan dan perubahan RPJM Desa ini dilakukan sesuai petunjuk teknis dari penyusunan RPJM Desa. Dimana semua kegiatan ini dilaksanakan dengan seksama dan dilaksanakn oleh kepala desa hingga masyarakat. Semua elemen dalam hal ini ikut melaksanakan kegiatannya sesuai dengan porsi masing- masing proses.

e. Penyusunan RKP Desa

Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah dimana seorang pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;

- 2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/ kegiatan masuk ke Desa;
- 4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 5) Penyusunan rancangan RKP Desa;
- 6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 7) Penetapan RKP Desa;
- 8) Perubahan RKP Desa; dan
- 9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan diatas adalah gambaran mengenai perjalanan penyusunan RKP Desa. RKP Desa merupakan ini merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rancangan dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana



desa (ADD) yang meruakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota.

- f. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa** Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program pendamping sendiri.

Semua program-proram ini disepakati dan di bahas pada saat adanya musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan program sektoral dan program daerah ini dilaksanakan oleh perangkat desa beserta unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dikoordinasikan oleh Kepala Desa. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

1) Tahap Persiapan:

- a) Penetapan pelaksanaan kegiatan
- b) Penetapan rencana kerja (Renja)
- c) Sosialisasi
- d) Pembekalan pelaksanaan kegiatan
- e) Penyiapan dokumen administrasi
- f) Pengadaan tenaga kerja
- g) Pengadaan barang dan material

2) Tahap Pelaksanaan:

- a) Rapat kerja pelaksana kegiatan
- b) Pemeriksaan kegiatan
- c) Perubahan kegiatan



d) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat

e) Penyiapan laporan keuangan

f) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja

3. Destinasi Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul di masyarakat di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji.²⁷ Menurut Undang-undang Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata merupakan banyak ragam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai faktor dan kondisi yang membentuk kepariwisataan itu sendiri seperti aksesibilitas, fasilitas dan masyarakat yang saling berkaitan. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keindahan dan keunikan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (UU RI No. 10 Th. 2009).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara seluruh stakeholders yang ada.

b. Pengertian Objek Wisata dan Dampaknya

²⁷ A.J, Mulyadi. 2012. *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada. Hlm.46

Objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.²⁸ Sedangkan destinasi pariwisata adalah merupakan suatu kawasan geografis yang didukung oleh berbagai dukungan wisata seperti masyarakat, fasilitas, aksesibilitas dan bukti-bukti fisik yang mendukung terciptanya daerah kepariwisataan.²⁹ Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa obyek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut :³⁰

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya.

²⁸ Asriandi, Ian. 2016. *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Banteng*. Makassar: Jurnal. Universitas Hasanuddin. Hlm 67

²⁹ DPR RI-2009, *Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009. Kepariwisataan*.

³⁰ *Ibid.*

- 2) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja.

Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain.

- 3) Semakin luasnya lapangan kerja.

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta.

- 4) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

Peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu berbagai peninggalan sejarah berusaha di pelihara untuk menambah daya tarik pengunjung untuk datang di lokasi tersebut.

- 5) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Alam menjadi menarik karena adanya proses penataan dan pembangunan yang dilaksanakan untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

4. Indikator Pembangunan

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang di-gunakan dalam mengukur performa suatu Negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara lain. Evolusi yang terjadi pada makna *economic development* mengakibatkan terjadinya evolusi pada alat ukurnya

Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konseptual dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian *natural capital* sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*) yang dipenuhi kepentingan tertentu (*vested interest*) dari keuntungan semata (*rent seeking*). Demikianlah, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (*inter-region*) dan waktu (*inter-generation*). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas.³¹

Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat

³¹ Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif. Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES, hal. 56.

memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier.³²

Indikator Pembangunan menurut Deddy T. Tikson adalah:³³

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2. Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus

³² Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar : Gemilang Persada, hal. 56.

³³ *Ibid*, hal 57-60.

dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi.

4. Angka tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sehingga angka tabungan dapat menjadi salah satu factor penting dalam pembangunan.

5. Indeks kualitas hidup (IKH)

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Indeks pembangunan manusia (human development indeks)

Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

5. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan.

Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat.³⁴

Wisata pedesaan yang dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan. Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desaiwisatasadalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi ‘atraksi’ sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku.³⁵

Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata.³⁶

Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.³⁷

Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata. Pertama yaitu akomodasi yang digunakan sebagai tempat tinggal wisatawan, biasanya desa wisata memanfaatkan tempat tinggal masyarakat lokal setempat dan ruang yang dikembangkan di area sekitar desa wisata. Kedua yaitu atraksi atau daya tarik, daya tarik desa wisata berupa kehidup

³⁴ Baiquni & Wardiyanto. 2011. *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Bandung : Lubuk Agung. Hal 56

³⁵ Antara, I Ketut. (2011). *Strategi pengembangan pariwisata alternatif di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung*. Jurnal Analisis Pariwisata Vol.10. Hal 43

³⁶ Ernawati, Ni Made. (2010). *Tingkat kesiapan desa sebagai tempat wisata berbasis masyarakat*. Bali : Politeknik Negeri Bali. Jurnal Analiss Pariwisata Vol.10. Hal 49

³⁷ *Ibid*

keseharian penduduk setempat beserta kondisi lingkungan khas pedesaan yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat lokal.³⁸

Selain akomodasi dan atraksi, komponen desa wisata dilihat dari keunikan dan keaslian suatu desa wisata, letaknya yang berdekatan dengan keadaan alam yang luar biasa, memiliki budaya yang unik yang dapat menari pengunjung, serta memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari sarana dan prasarana.

Komponen desa wisata terdiri dari empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah partisipasi masyarakat lokal, adanya sistem norma yang ada di desa tersebut, adat dan budaya setempat yang masih asli. Desa wisata harus memiliki potensi pariwisata, seni dan kebiasaan di daerah setempat, area desa masuk kedalam lingkup kawasan pengembangan pariwisata atau setidaknya ada dalam rute perjalanan *tour package* yang telah dijual, tersedianya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku seni yang dapat mendukung keberlangsungan desa wisata tersebut, aksesibilitas yang dapat mendukung program desa wisata.³⁹

G. Definisi Operasional

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau kontribusi masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan destinasi wisata. Indikator yang digunakan dalam menentukan partisipasi masyarakat adalah menggunakan konstruk Mardikanto dkk (2013:82) mengatakan ada empat langkah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.

³⁸ Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava media. Hal 78

³⁹ *Op.Cit.* Ernawati, Ni Made. 2010.

4. Memelihara hasil-hasil pembangunan.⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁴¹ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di objek wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pengambilan lokasi ini didasarkan atas fakta bahwa Destinasi Wisata Gunung Beruk telah menjadi ikon desa dan masuk di dalam promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu destinasi yang sukses dibangun oleh Pemerintah Desa.

3. Tehnik Penentuan *Informan* Penelitian

⁴⁰ *Op.Cit.* Mardikanto Totok. 2013, hal. 82.

⁴¹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Hlm. 55

⁴² *Ibid*

Tehnik yang digunakan di dalam melakukan penentuan informan ini menggunakan *purposive sampling*. *Purporsive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁴³ Kriteria yang dimaksud adalah :

- a. Informan adalah pelaku/pelaksana/ terlibat langsung dalam pembangunan objek wisata Gunung Beruk
- b. Informan bersikap objektif dan tidak memiliki kecenderungan sikap subjektif
- c. Informan memahami tema dan tujuan penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, maka *informan* yang ada di dalam penelitian ini adalah meliputi :

Tabel 1.2.

Data Informan

Jabatan	Jumlah
Kepala Desa	1
Ketua BPD	1
Kamituwo Krajan	1
Kamituwo Bibis	1
Kamituwo Bendo	1
Kamituwo Tanggungrejo	1
Ketua PKK	1
Ketua Pemuda/Karangtaruna	1
Anggota LSM	1

⁴³ Op.Cit, Sugiyono. 2017. Hlm 56

Masyarakat Dukuh Krajan	1
Masyarakat Dukuh Bibis	1
Masyarakat Dukuh Bendo	1
Masyarakat Dukuh Tanggungrejo	1
Jumlah	13

Sumber data: Hasil wawancara

4. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data kedua adalah data sekunder sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa terkait masalah pembangunan destinasi wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Tehnik Observasi

Observasi merupakan model pengumpulan data dengan cara mengamati untuk merasakan dan memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi

⁴⁴ *Ibid*

penelitian yaitu destinasi wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang mencakup data desa dan kondisi eksisting lahan.

b. Tehnik Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka dan dilakukan secara mendetail dan mendalam dan dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁵ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan masalah destinasi wisata Gunung Beruk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan dilakukan terhadap informan penelitian yang telah ditetapkan.

c. Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu table cek list, kamera dan *tape recorder*.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisa melakukan penggalian yang secara mendalam. Analisa data kualitatif prosesnya ada berbagai cara yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.⁴⁶

Dalam model interaksi, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaksi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan data tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Huberman dan Miles dalam Moleong, 2014) seperti gambar di atas.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ J.Moleong, Lexy. 2018 *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan ke-38, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal 100

Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara ke empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian berlangsung.

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas .⁴⁷

a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.⁴⁸

c. Penyajian data

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Prenada Media Group. Hal. 150

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.⁴⁹

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).

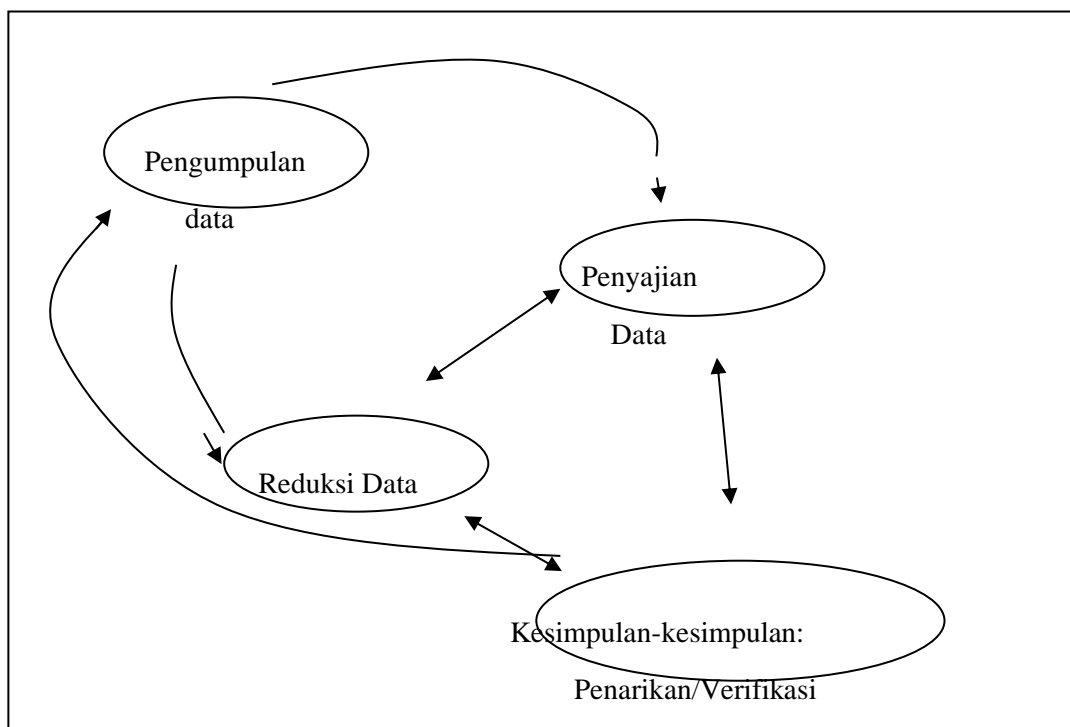
Kemudian model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiono menjelaskan bahwa: dalam pandangan model *interaktif* ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).⁴² Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018 : 337p.

Gambar 1.1.

Model Interaktif / Skema Analisis Data Penelitian



Sumber data : Sugiyono, 2018